

Contesting Urban Space Transformation in Semarang: A Study of the Simpang Lima Area from 1975-2000

Sulton Widianoro^{a*}, Putri Agus Wijayati^b

^{ab}Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

*sulton80@students.unnes.ac.id

Abstract

This article examines the contestation of urban space that occurred in the Simpang Lima area of Semarang during the period from 1975 to 2000. Initially designed as a public space for social and cultural activities, Simpang Lima experienced a struggle for space involving the government, private sector, and the community. This study explores how shifts in city government policies, which initially prioritized public interests, gradually shifted towards the commercialization of spaces. The main issue addressed in this paper is how the Simpang Lima area transformed its spatial function from a public to a private space. The research questions of this study are: how did the process of urban space contestation in Semarang occur between 1975 and 2000? And what were the impacts of this urban space contestation? This study aims to understand the process of urban space contestation in the Simpang Lima area of Semarang resulting from changes in city government policies. The research uses historical research methods. Primary sources for this study were obtained from contemporary documents and newspapers, while secondary sources were obtained from related books, articles, and theses. This research shows that the private sector won the contestation of urban space in the Simpang Lima area due to its economic strength. Government policies also increasingly strengthened the position of the private sector to dominate the Simpang Lima area. Consequently, this area lost its public space function, and its development focused solely on the economic sector.

Keywords: Semarang, space, commercialization, public

Kontestasi Perebutan Ruang Kota Semarang: Studi Kasus Kawasan Simpang Lima tahun 1975-2000

Abstrak

Artikel ini mengkaji kontestasi ruang kota yang terjadi di kawasan Simpang Lima Semarang pada periode 1975-2000. Kawasan ini awalnya dirancang sebagai ruang publik untuk aktivitas sosial dan budaya, Simpang Lima mengalami perebutan ruang yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Studi ini mengeksplorasi bagaimana pergeseran kebijakan pemerintah kota yang awalnya mengedepankan kepentingan publik, bergeser mengarah pada komersialisasi ruang-ruang. Permasalahan utama dalam tulisan ini adalah bagaimana kawasan Simpang Lima mengalami perubahan fungsi ruang dari ruang publik menjadi ruang privat. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana proses perebutan ruang kota Semarang pada tahun 1975-2000? Dan apa dampak dari perebutan ruang kota tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perebutan ruang kota di kawasan Simpang Lima Semarang yang diakibatkan oleh perubahan kebijakan pemerintah kota. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Sumber Primer pada penelitian ini didapatkan dari dokumen dan koran sezaman, sementara sumber sekunder didapatkan dari buku, artikel, dan tesis terkait. Hasil penelitian ini adalah bahwa perebutan ruang kota di kawasan Simpang Lima dimenangkan oleh pihak swasta dikarenakan kekuatan ekonomi yang dimiliki. Kebijakan pemerintah juga semakin menguatkan posisi swasta untuk menguasai kawasan Simpang Lima. Akibatnya, kawasan ini kehilangan fungsi ruang publik dan pembangunannya hanya berfokus pada sektor ekonomi.

Kata Kunci : Semarang, ruang, komersialisasi, publik

Pendahuluan

Dalam memahami perkembangan sebuah kota, ruang memiliki kedudukan penting dalam struktur kota itu sendiri. Aktivitas warga kota selalu berputar dalam sebuah ruang, karena ruang memiliki fungsi di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Dengan berbagai fungsi yang dimiliki oleh ruang, membuatnya menjadi objek perebutan bagi warga kota. Basundoro menyatakan bahwa setidaknya ada tiga pihak yang terlibat dalam perebutan tersebut yaitu masyarakat, pemerintah kota, dan pihak eksternal atau swasta (Basundoro, 2018). Dalam hal ini, pihak yang sering kali dirugikan dalam kontestasi ruang adalah pihak masyarakat, hal tersebut sangat ironis mengingat masyarakatlah yang paling membutuhkan ruang dalam kota. Tak jarang, pihak swasta keluar sebagai pemenang dalam kontestasi ini, yang kemudian berujung pada komersialisasi akan ruang.

Pada tahun 1980-an sejalan dengan visi pemerintah Orde Baru kala itu yang mengubah haluan pembangunan ekonomi dari semula bergantung pada produksi bahan mentah menjadi bersandar pada industri dan perdagangan jasa, membuat wajah kota-kota di Indonesia juga ikut berubah. Hal ini disebabkan oleh harapan pemerintah agar modal swasta dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia, akibatnya beberapa kota di Indonesia mengalami perubahan yang cukup besar dalam hal tata ruang perkotaannya. Banyak ruang-ruang perkotaan yang awalnya dimiliki oleh pemerintah daerah dibeli oleh pihak swasta dan diubah untuk menghasilkan keuntungan finansial bagi para investor. Bahkan, ruang yang awalnya dijadikan sebagai ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga kota, kehilangan fungsinya karena terjadinya komersialisasi ruang publik (Pratiwo, 2014). Ruang-ruang di perkotaan yang sebelumnya dianggap tidak membawa keuntungan ekonomi bagi kota, disulap sedemikian rupa untuk dapat menampung kegiatan ekonomi. Sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan kota paling tinggi di Indonesia, Kota Semarang juga ikut mengalami perubahan orientasi pembangunan kota. Sebenarnya saat terjadi perubahan arah pembangunan, Kota Semarang memiliki masterplan 25 tahunan, yaitu Rencana Induk Kota (RIK) Semarang 1975-2000.

Namun, pada tahun 1981, Rencana Induk Kota Semarang tersebut mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Perda No. 5 tahun 1981 yang membuat arah pembangunan tata ruang Kota Semarang lebih memprioritaskan aspek ekonomi dan menyingkirkan aspek lainnya. Akibatnya beberapa ruang kota yang dinilai tidak menguntungkan tergantikan oleh gedung-gedung yang membawa manfaat secara ekonomi. Simpang Lima sebagai alun-alun baru di Kota Semarang awalnya memiliki fungsi sebagai ruang publik dan difokuskan untuk kegiatan pemerintahan dan budaya, hal ini terdapat dalam Rencana Induk Kota Semarang 1975-2000. Namun pada tahun 1980-an, kawasan ini berubah menjadi CBD (*Central Business District*) yang membuatnya dipenuhi oleh gedung-gedung pusat perbelanjaan, perkantoran, dan hotel. Gedung-gedung yang awalnya dibangun untuk menunjang aktivitas publik di Simpang Lima seperti Gedung Olahraga dan Wisma Pancasila dirobohkan dan diganti menjadi Mal Citraland dan juga Plaza Simpang Lima.

Tidak hanya gedung-gedung komersil saja yang menjamur di Semarang pada masa itu, sektor informal juga ikut banyak berkembang pada tahun 1980-an. Hal ini diakibatkan oleh *Economic Boom* yang dialami Kota Semarang, yang menjadi magnet bagi daerah sekitar untuk mengadu nasib, sehingga menyebabkan peningkatan arus urbanisasi. Akan tetapi, besarnya arus urbanisasi ini tidak dapat ditampung oleh industri Kota Semarang, sehingga menyebabkan pihak yang tidak dapat masuk ke sektor industri beralih ke sektor informal. Perkembangan sektor informal ini biasanya mengincar pusat kota yang ramai, namun keberadaan mereka yang terkadang tidak terkendali, sering dianggap mengganggu ketertiban dan menjadi penyakit bagi wajah kota. Selaras dengan pernyataan Purwanto yang mengatakan bahwa sektor informal di Simpang Lima seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) awalnya tumbuh secara individu dan tidak terencana. Purwanto juga menambahkan keberadaan PKL ini menimbulkan paradoks, karena di satu sisi PKL dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kawasan namun di satu sisi juga mengganggu fungsi ruang publik.

Persoalan kontestasi perebutan ruang Kota Semarang ini merupakan permasalahan yang timbul seiring dengan perkembangan kota itu sendiri. Kota dengan ruang yang sangat terbatas, tidak akan mampu menciptakan ruang ideal bagi semua manusia di dalamnya. Lebfvre menjelaskan bahwa saat ini ruang sudah bukanlah sebuah lingkungan geografis kosong yang pasif, namun ruang telah berubah menjadi suatu komoditas yang memiliki nilai tukar setara dengan komoditas pasar lainnya. Sehingga ruang akan selalu menjadi perebutan dan berkembang sesuai kepentingan pihak pemenang dari kontestasi ruang di perkotaan.

Dalam “Privatisasi Ruang Publik dari Civic Centre menjadi Central Business District (Belajar dari Kasus Kawasan Simpang Lima Semarang)” yang ditulis oleh Edi Purwanto dijelaskan bagaimana awal mula kota Semarang mulai kehilangan ruang publik. Diawali dari kawasan Simpang Lima Semarang yang di rancang dalam Rencana Induk Kota Semarang tahun 1975-2000 untuk menjadi ruang publik yang bebas untuk digunakan semua kalangan masyarakat, berubah menjadi kawasan privat yang digunakan untuk kegiatan komersil. Meskipun membawa manfaat dalam hal ekonomi, namun privatisasi ruang publik ini justru menimbulkan permasalahan yang lebih meluas ke arah sosial masyarakat kota. Dibangunnya gedung-gedung perbelanjaan, hotel-hotel, dan jalur pedestrian yang kemudian dikuasai oleh pedagang kaki lima membuat fungsi ruang publik Simpang Lima yang tadinya bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan publik seperti tempat bermain anak-anak berubah fungsi dan bahkan berubah menjadi ruang mati yang dapat memunculkan penyakit sosial yang meresahkan contohnya premanisme dan prostitusi.

Selanjutnya, terdapat Tesis yang ditulis oleh Purnomo Dwi Sasongko dengan judul “Kajian Perubahan Fungsi Taman Kota di Kota Semarang”. Dijelaskan bahwa setidaknya dari tahun 1991 hingga tahun 2001 terdapat 7 taman kota yang mengalami perubahan baik secara fungsi, dimensi, dan bahkan kepemilikan. Perubahan ini membuat fungsi ruang publik dari taman kota menjadi terganggu dan bahkan tergantikan. Awalnya taman-taman tersebut banyak yang dimanfaatkan untuk beraktivitas anak-anak dan remaja sepulang mereka sekolah seperti bermain sepakbola dan sebagainya. Namun semenjak taman tersebut beralih fungsi menjadi perkantoran maupun tempat hiburan karaoke, banyak taman tersebut yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain alasan berkurangnya dimensi dari beberapa taman sehingga membuat anak-anak sulit untuk bermain di sana, faktor kebersihan juga menjadi salah satu penyebab mengapa taman-taman kota itu tidak dimanfaatkan lagi.

Seperti yang diungkapkan oleh B. Setiawan dimana saat ini kota telah mengalami proses “dehumanisasi” yang menggeser ruang-ruang sosial dan kultural dan pemerintah tidak dapat mengintervensi kekuatan pasar yang mendominasi. Akibatnya warga kota terpaksa beraktivitas di ruang-ruang yang dikomersialisasikan dan sayangnya tidak semua kalangan bisa mengakses ruang-ruang tersebut (Setiawan, 2010).

Tulisan ini berusaha untuk melihat proses perebutan ruang kota di kawasan Simpang Lima Semarang secara historiografis. Tulisan-tulisan sebelumnya yang membahas mengenai kontestasi ruang di Simpang Lima belum membahas proses perebutan secara kronologis. Untuk itu diperlukan penelitian ini yang mencoba melihat proses perebutan ruang kota Simpang Lima Semarang secara historiografis.

Tulisan ini mencoba mengikuti pandangan Lefebvre mengenai produksi ruang sosial. Dalam teori produksi ruang sosial yang dikemukakan oleh Henri Lefebvre, ruang tidak hanya dilihat sebagai entitas fisik, tetapi juga sebagai hasil dari proses sosial dan ekonomi. Konsep *conceived space* yang diutarakan Lefebvre menunjukkan bagaimana ruang yang dirancang dan direncanakan sering kali meninggalkan residu permasalahan ketika bersinggungan dengan *lived space*, yaitu ruang yang dijalani dan dialami oleh masyarakat sehari-hari (Lefebvre, 1991). Fenomena ini dapat dilihat secara jelas dalam konteks kawasan perkotaan yang mengalami komersialisasi, seperti yang terjadi di Simpang Lima.

Berangkat dari berbagai persoalan tersebut, permasalahan utama dalam tulisan ini adalah bagaimana perebutan ruang kota di kawasan Simpang Lima Semarang berlangsung yang membuat kawasan ini berubah dari ruang publik menjadi ruang privat. Berangkat dari pokok permasalahan tersebut, dapat diajukan pertanyaan penelitian, sebagai berikut (1) Bagaimana proses perebutan ruang Kota Semarang pada tahun 1975-2000 terjadi?, (2) Apa dampak yang ditimbulkan dari perebutan ruang kota tersebut?

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Langkah awal yang dilakukan yaitu mengumpulkan sumber-sumber sejarah atau heuristik, baik sumber primer maupun sumber sekunder, sumber yang tercetak ataupun tertulis (Kuntowijoyo, 2005), peneliti mengumpulkan sumber primer yang berasal dari surat-surat kabar sezaman, Perda yang berlaku selama kurun waktu 1975-2000. Sumber primer juga peneliti dapatkan dari Dinas Arsip dan Pustaka Jawa Tengah, dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber sekunder dari karya ilmiah seperti buku dan artikel jurnal yang relevan dengan topik pembahasan. Setelah pengumpulan sumber sejarah, tahap selanjutnya yaitu

verifikasi atau kritik sumber agar memperoleh validitas data. Peneliti melakukan kritik sumber dengan melihat gaya bahasa, gaya tulisan, tinta, bentuk dokumen yang digunakan, memperhatikan waktu dan asal pembuatan sumber sezaman dengan peristiwa sejarah yang sedang diteliti, memeriksa kredibilitas informasi yang terdapat pada sumber, serta membandingkan satu sumber dengan sumber lain guna mendapat data yang konsisten dan akurat. Langkah selanjutnya adalah interpretasi atau menafsirkan data dan informasi yang telah diperoleh dari sumber-sumber sejarah, serta menghubungkan berbagai sumber untuk menyusun narasi sejarah yang koheren, dan meminimalisir adanya subjektivitas pada hasil penelitian. Langkah terakhir yaitu historiografi, menyajikan berbagai fakta sejarah yang telah didapatkan secara kronologis dan memberikan pemahaman yang komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

Simpang Lima sebagai Ruang Terbuka Publik

Kawasan Simpang Lima dengan komponen utamanya yaitu Lapangan Pancasila merupakan salah satu ruang terbuka publik di Semarang yang keberadaannya sudah dirancang sejak masa Hindia Belanda. Pada peta tahun 1922 yang di rancang oleh Karsten, telah tampak Jalan K.H Ahmad Dahlan dan Jalan Pahlawan, yang menandakan bahwa Herman Thomas Karsten yang menciptakan embrio Kawasan Simpang Lima di dalam kota Semarang sebagai kota modern (Muljadinata, 2019).

Peningkatan jumlah penduduk di Semarang sejak awal tahun 1950an berdampak besar terhadap perubahan fisik kota. Salah satu yang terdampak ialah alun-alun lama Semarang yang semakin tertutup ruang terbukanya karena tingginya intensitas penggunaan ruang dari kegiatan pasar Johar. Dengan berkembangnya kota Semarang, timbul pula kebutuhan akan pusat kota lain. Sehingga pada tahun 1960-an pusat kota Semarang mulai bergeser dari daerah Kanjengan (alun-alun lama Semarang) ke daerah Selatan di kaki bukit Candi. Kepala DPU Jawa Tengah, dan Jawatan Gedung-gedung Negara di Kota Semarang, melakukan diskusi untuk menentukan lokasi baru pusat kota (Muhammad, 1992). Setelah dilakukan penelitian, kawasan yang sesuai untuk dijadikan alun-alun baru yaitu kawasan daerah ujung jalan Seteran (sekarang Jalan Gajah Mada), ke arah kaki bukit Candi. Terpilihnya daerah tersebut karena kawasan tersebut masih berupa rawa, tanah kosong dan areal persawahan.

Alun-alun baru Semarang pertama kali dicetuskan oleh Presiden Sukarno, dimana kawasan Simpang Lima dirancang sebagai pusat kegiatan masyarakat yang berorientasi pada kebudayaan dan pendidikan. Alun-alun baru ini perancangannya meniru konsep lokal yaitu sebagai tempat seba dan tempat berkumpul. Alun-alun baru ini dirancang untuk dapat menampung lebih dari 100 ribu rakyat. Dalam gagasan Soekarno, ketika menjadi presiden, alun-alun menjadi identitas kota di Jawa sebagai media untuk bertemu dengan rakyat. (Rukayah, 2021).

Pembangunan Simpang Lima secara fisik dimulai pada Maret 1965, namun pembangunan tersebut sempat terhenti karena adanya boikot yang dilakukan oleh PKI. Pengurugan rawa dilakukan hingga 40%, pembangunan baru dapat dilanjutkan kembali pada tahun 1967-1968. Setelah mengubah lahan penuh menjadi lahan siap pakai, selanjutnya dilakukan pembendungan terhadap sungai-sungai yang alirannya mengarah ke Simpang Lima. Proyek pembangunan Simpang Lima dapat terselesaikan di tahun 1969, dan Lapangan Pancasila sebagai alun-alun kawasan Simpang Lima diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969 (Wijono, 2013).

Pada awal pembangunan, kawasan Simpang Lima hanya terdapat satu perempatan saja yaitu Jalan Seteran terus ke Oei Tiong Ham weg (sekarang jalan Pahlawan), dan ke barat dan timur terdapat Pieter Sythofflaan (sekarang Jalan Pandanaran) dan Hoogenraadsiaan (sekarang Jalan Jendral Ahmad Yani). Diberi nama "Simpang Lima" karena pada saat selesai pembangunan dibuka jalan baru yaitu Jalan KH. Achmad Dahlan, sehingga kawasan Simpang Lima terdapat lima ruas jalan yang melewatinya (Purmerend, 1995).



Gambar 1. Simpang Lima pada tahun 1970 dengan pemandangan Candi Baru di bagian belakang
(Sumber: *Semarang Beeld van een Stad*, 1995)

Selanjutnya, gedung-gedung pemerintahan mulai dibangun. Diantaranya, kantor Gubernur Jawa Tengah yang sebelumnya berada di Jalan Bojong (sekarang Jalan Pemuda) berpindah ke Jalan Pahlawan menempati gedung bertingkat yang megah dan dikenal dengan nama Gedung Berlian. Gedung kantor Daerah Kepolisian Jawa Tengah yang dulunya berada di Jalan Dr. Cipto berpindah ke Jalan Pahlawan dan menempati bekas tanah milik Oei Tiong Ham. Selanjutnya, terdapat Gedung Kantor Telkom, Gedung Pertemuan Rimba Graha, yang banyak dikenal oleh masyarakat Semarang. Dibangun pula gedung lain yaitu Gedung Kantor Perdagangan, Gedung Bank Indonesia, Kampus Undip dan Museum (sekarang sudah dipindah), dan tepat dibawah tanjakan bukit menuju daerah Candi Baru (sekarang Gajahmungkur) terdapat Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal (Tio, 2008).

Karena kawasan Simpang Lima ini dirancang meniru konsep lokal, maka sesuai dengan tradisi, di setiap pojok alun-alun atau Lapangan Pancasila tersebut ditanami empat buah pohon beringin. Selain itu, dibangun pula sebuah masjid besar yang memiliki menara yaitu masjid Baiturrahman. Pada bagian barat, dibangun gedung pertokoan yaitu Gajahmada Plaza. Bangunan lain yang didirikan yaitu Gedung Olahraga Pancasila sebagai pusat olahraga dan kesenian Jawa Tengah. Di sebelah timur GOR Pancasila, berdiri gedung pertemuan yaitu Wisma Pancasila yang menjadi kebanggaan masyarakat Semarang. Selain itu, didirikan pula sebuah sekolah kejuruan terkemuka di Semarang yaitu STM Pembangunan (Tio, 2008). Dengan demikian, telah lengkap pusat kota Semarang yang baru dengan Lapangan Pancasila sebagai lingkungan pengenalan (*landmark*).



Gambar 2. Pemandangan Simpang Lima pada tahun 1970 (foto diambil dari arah utara, sejajar dengan Jalan Pahlawan).
(Sumber: *Semarang Beeld van een Stad*, 1995)

Perebutan Ruang di Kawasan Simpang Lima tahun 1975-2000

Ruang yang selama ini menjadi pusat aktivitas masyarakat seringkali tidak dipikirkan dengan seksama. Pemaknaan akan ruang tidak hanya terbatas pada bentuk geografisnya saja, lebih dari itu, ruang memiliki dimensi sosial dan budaya yang kompleks. Lefebvre mengemukakan bahwa ruang berkembang bersamaan dengan orang-orang di dalamnya (Lefebvre, 1991). Dijelaskan pula bahwasanya ruang itu sendiri tidak akan pernah menjadi ideal, karena ruang itu sendiri memiliki keterbatasan. Ruang dengan keterbatasannya akan

terus diperebutkan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingannya masing-masing. Pada akhirnya, ruang akan bertransformasi sesuai dengan kepentingan pihak yang memenangkan kontestasi ruang kota.

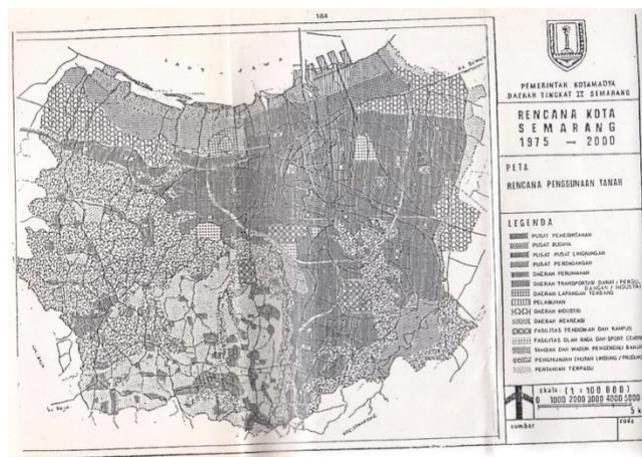
Ruang di perkotaan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan ruang di perdesaan. Di kota, ruang sering kali lebih padat dan lebih banyak digunakan untuk kegiatan ekonomi, politik, dan sosial. Konsep ruang perkotaan mencakup berbagai elemen seperti gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, jalan raya, dan ruang terbuka publik. Setiap elemen ini memiliki fungsi dan makna tersendiri yang terus berkembang seiring dengan perubahan masyarakat yang menghuninya.

Perbedaan mendasar antara ruang perkotaan dan perdesaan terletak pada intensitas penggunaan dan nilai ekonomis yang dikaitkan dengan ruang tersebut. Di perkotaan, ruang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga sering kali menjadi objek investasi dan komersialisasi. Sedangkan di perdesaan, ruang lebih cenderung digunakan untuk kegiatan agraris dan memiliki nilai ekonomis yang berbeda. Di sini, penting untuk memahami bagaimana proses urbanisasi dan industrialisasi mempengaruhi distribusi dan penggunaan ruang di kota. Hal ini dikarenakan, meningkatnya urbanisasi yang tidak dibarengi dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai, akan menciptakan sektor-sektor informal (Pratama, 2023). Masalah yang diakibatkan urbanisasi berlebih ini dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial (Salawati, 2021).

Lefebvre menegaskan bahwa ruang bukan hanya entitas statis seperti yang selama ini dianggap banyak orang, melainkan hasil dari interaksi sosial yang dinamis. Ruang dihasilkan melalui proses sosial, ekonomi, dan politik yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda. Dalam konteks perkotaan, ruang menjadi arena kontestasi antara kepentingan publik dan privat, antara fungsi sosial dan nilai ekonomi.

Lefebvre mengklasifikasikan ruang menjadi tiga kategori, yaitu *conceived space* (ruang yang direncanakan), *perceived space* (ruang yang dirasakan), dan *lived space* (ruang yang dialami) (Crang, 1999). *Conceived space* adalah ruang yang dirancang oleh perencana dan arsitek, biasanya berfokus pada aspek fungsional dan estetika. *Perceived space* adalah ruang yang dirasakan dan digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, mencakup penggunaan praktis dan pengalaman fisik. Sedangkan *lived space* adalah ruang yang dialami secara subyektif, mengandung makna sosial dan simbolik bagi individu dan komunitas (Zhang, 2006).

Kawasan Simpang Lima merupakan contoh nyata bagaimana ruang perkotaan bertransformasi akibat kontestasi berbagai kepentingan. Awalnya, kawasan ini dibangun dengan tujuan untuk mengembangkan kegiatan kebudayaan masyarakat. Dalam dokumen Rencana Induk Kota Semarang tahun 1975-2000, disebutkan bahwa kawasan Simpang Lima Semarang dibangun untuk mengembangkan kegiatan kebudayaan masyarakat (Pratiwo, 2014).



Gambar 3. Peta Rencana Induk Kota Semarang 1975-2000
(Sumber: BAPPEDA Kota Semarang)

Presiden Soekarno yang memprakarsai pembangunan ini memiliki visi untuk menjadikan kawasan ini sebagai pusat kegiatan sosial dan politik. Luasnya lapangan ini yang dapat menampung ribuan orang menunjukkan bahwa lapangan ini dirancang agar nantinya kegiatan-kegiatan politik bisa dilaksanakan di

sini. Bukti bahwa kawasan ini dikembangkan sebagai pusat kegiatan sosial adalah adanya GOR (Gelanggang Olahraga), Masjid Baiturrahman, Kampus Undip, STM Pembangunan, dan ada pula Museum. Banyaknya bangunan untuk memfasilitasi berbagai kegiatan publik di kawasan ini serta strategisnya letak geografis yang menjadi pertemuan kota atas dan kota bawah membuatnya menjadi ruang sirkulasi lalu lintas pusat kota (Rukayah, 2005).

Posisi geografis kawasan Simpang Lima yang sangat strategis membuatnya seperti magnet bagi sektor privat untuk menguasai kawasan ini. Orientasi pembangunan ekonomi dan upaya untuk meningkatkan iklim investasi pada masa Orde Baru mempengaruhi kebijakan-kebijakan serta ruang-ruang yang dianggap tidak menghasilkan nilai ekonomi di perkotaan (Makkelo, 2017). Ruang-ruang publik dan ruang terbuka yang ada di kota Semarang diubah menjadi kawasan bisnis seperti gedung perkantoran, hotel, dan mall yang memiliki nilai ekonomis. Dalam kasus ini, kawasan Simpang Lima yang awalnya merupakan ruang terbuka publik dan dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat dijual ke para investor dan dijadikan CBD (Central Business District) pada tahun 1980-an (Haryanti, 2008).

Proses transformasi kawasan ini dimulai pada tahun 1978-an ditandai dibangunnya berbagai bangunan perbelanjaan dan perhotelan (Rukayah, 2005). Bangunan perbelanjaan pertama yang dibangun adalah Ruko Simpang Lima dan Super Ekonomi. Bangunan ini merupakan gedung berbentuk ruko dengan deretan toko-toko seperti Myosa, Restoran Akarsana, Batik Danarhadi, Toko sepatu Virgo, dll.

Bentuk transformasi selanjutnya adalah dirobokkannya Gedung Pertemuan Wisma Pancasila untuk digantikan menjadi Bangunan Plasa Simpang Lima. Plasa ini dibangun sekitar tahun 1980-an dan menarik minat masyarakat untuk berbelanja karena konsep bangunan yang berbentuk Plasa (Rukayah, 2005). Gedung Pertemuan Wisma Pancasila sendiri merupakan bangunan serba guna yang dapat difungsikan untuk berbagai macam kegiatan. Selain Wisma Pancasila, ada pula bangunan serba guna yang tergantikan oleh bangunan komersil. Bangunan ini adalah GOR yang tadinya dimanfaatkan oleh publik untuk menampung kegiatan-kegiatan olahraga dan kegiatan kesenian, tergantikan dengan mal perbelanjaan yang orientasinya untuk kegiatan ekonomi. Mal Citraland ini dibangun dan dirancang sebagai objek utama kawasan Simpang Lima, hal ini terlihat dari konsep sirkulasi yang menghubungkan pejalan di antara gedung-gedung sekitarnya.

Perebutan ruang yang terjadi di kawasan ini tidak hanya dialami oleh ruang-ruang publik saja, namun juga menysar ruang pendidikan seperti STM Pembangunan (saat ini dikenal sebagai SMKN 7 Semarang). Sekolah yang seharusnya terbebas dari perebutan ruang yang terjadi di kawasan ini, justru berusaha untuk dijual oleh pemerintah kota. Secara terang-terangan, H. Soetrisno Suharto yang menjabat sebagai Walikota Semarang pada saat itu, menawarkan STM Pembangunan kepada para investor (Suara Merdeka, 1996). Dijualnya STM Pembangunan ini menunjukkan ambisi pemerintah kota yang begitu membabi buta untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di kawasan ini.

Proses transformasi ini kemudian memunculkan berbagai sektor informal di sekitar kawasan ini. Suasana pusat kota dengan lalu-lintas yang padat mengundang para pedagang untuk mengadu nasib di kawasan ini. Terdapat ratusan pedagang kaki lima dan tenda-tenda tempat makan yang berdiri di sekeliling alun-alun dan sepanjang jalan Pahlawan (Tio, 2002). Setidaknya terdapat 127 PKL (Pedagang Kaki Lima) yang berjualan di sekitar kawasan ini (Senat Mahasiswa Akademi Kimia Industri St. Paulus, 1991). Transformasi ruang juga berdampak pada keindahan kawasan ini, dengan tingginya aktivitas ekonomi kawasan ini, memunculkan banyak billboard atau papan iklan di kawasan ini (Tio, 2002). Papan-papan iklan mengelilingi kawasan ini dan menutupi keindahan dari kawasan ini.

Perubahan fungsi ruang publik ini bukanlah hal yang baru, bahkan sudah banyak terjadi terutama di Eropa. Menurut Habermas, ruang publik memang sejatinya tidak bisa dilepaskan dari kuasa. Ruang-ruang publik terus berkembang mengikuti kepentingan dari penguasa, terutama negara dan sektor privat sebagai pemilik modal (Prasetyo, 2012). Kasus Simpang Lima menunjukkan bagaimana perubahan fungsi ruang publik menjadi ruang komersial dapat mengubah dinamika sosial dan ekonomi di kawasan tersebut. Gedung olahraga yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat digantikan dengan bangunan komersial yang bersifat privat. Meskipun mal atau pusat perbelanjaan juga merupakan ruang publik, pemaknaannya berbeda dengan ruang publik lainnya seperti taman dan lapangan. Mal dirancang khusus untuk kegiatan ekonomi, sehingga untuk menikmati gedung perbelanjaan dengan penuh, orang-orang diharuskan untuk berbelanja. Berbeda

dengan taman kota atau gedung olahraga yang dapat dimanfaatkan secara komunal tanpa adanya tuntutan ekonomi.

Transformasi ruang di Simpang Lima mencerminkan dinamika perebutan ruang yang kompleks. Pemerintah kota, sektor privat, dan masyarakat umum semuanya memiliki kepentingan yang berbeda-beda terhadap penggunaan ruang ini. Pemerintah kota, dalam upayanya untuk meningkatkan investasi dan nilai ekonomi kawasan, sering kali mengesampingkan kepentingan masyarakat yang membutuhkan ruang publik untuk berbagai aktivitas sosial. (Lisdiyono, 2008) Sektor privat, dengan modal yang mereka miliki, mampu menguasai ruang-ruang strategis dan mengubahnya menjadi kawasan komersial yang menguntungkan secara ekonomi. Di sisi lain, masyarakat umum, terutama mereka yang berasal dari kelas menengah ke bawah, sering kali kehilangan akses terhadap ruang publik yang penting bagi kehidupan sehari-hari mereka.

Dalam proses perebutan ruang ini, sektor privat sering kali memiliki keuntungan lebih besar karena memiliki sumber daya finansial dan pengaruh politik yang kuat. Mereka dapat menggunakan kekuatan ekonominya untuk mempengaruhi kebijakan publik dan mendapatkan akses ke lahan-lahan strategis di kota. Di sisi lain, masyarakat kelas menengah ke bawah sering kali tidak memiliki kekuatan yang sama untuk mempertahankan akses mereka terhadap ruang publik. Akibatnya, mereka harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Transformasi dan Dampak Sosial Simpang Lima

Pada awalnya, kawasan ini dirancang sebagai ruang publik yang luas untuk berbagai kegiatan sosial dan politik. Namun, dengan berjalannya waktu, orientasi pembangunan berubah, dan kepentingan ekonomi menjadi lebih dominan. Pada era 1980-an, kebijakan pemerintah Orde Baru yang berorientasi pada pembangunan ekonomi dan peningkatan iklim investasi mulai menggeser fungsi-fungsi sosial dari ruang-ruang publik (Makkelo, 2017). Hal ini tercermin dalam transformasi kawasan Simpang Lima, di mana ruang-ruang terbuka yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas komunal dijual kepada investor untuk dijadikan pusat bisnis (Purwanto, 2014). Gedung-gedung seperti Gelanggang Olahraga digantikan oleh Mal Ciputra, dan Wisma Pancasila dirobohkan untuk membangun Plasa Simpang Lima.

Proses transformasi ini tidak hanya mengubah fisik dari ruang tersebut, tetapi juga mengubah dinamika sosial di kawasan itu. Masyarakat yang sebelumnya menggunakan ruang-ruang publik untuk berinteraksi dan berkegiatan kini harus beradaptasi dengan ruang-ruang komersial yang memiliki akses lebih terbatas dan berorientasi pada ekonomi semata. Perubahan ini lebih menguntungkan sektor privat dan pemilik modal, sementara masyarakat umum, terutama kelas menengah ke bawah, menjadi pihak yang terpinggirkan (Purwanto, 2014). Proses ini mencerminkan bagaimana ruang kota tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh dinamika kekuasaan yang ada (Lefebvre, 1991).

Pemerintah kota, dalam upayanya untuk meningkatkan pendapatan dan menarik investasi, sering kali mengesampingkan kebutuhan sosial masyarakat (Suhada, 2023). Dalam konteks ini, kita bisa melihat bagaimana ruang publik menjadi komoditas yang diperebutkan oleh berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda. Sektor privat dengan modal besar memiliki kekuatan untuk menguasai dan mengubah ruang kota sesuai dengan kepentingan ekonominya, sementara masyarakat umum harus berjuang untuk mempertahankan akses mereka terhadap ruang-ruang tersebut.

Seiring dengan munculnya gedung-gedung komersial di kawasan perkotaan, seperti Mal Ciputra, Plaza Simpang Lima, dan kantor-kantor yang mengelilingi kawasan tersebut, terjadi transformasi signifikan dalam penggunaan ruang. Awalnya, kawasan ini mungkin tidak dipadati oleh pedagang kaki lima (PKL). Namun, dengan berkembangnya ruang komersial, PKL mulai muncul secara sporadis di ruang-ruang yang tersisa. Kehadiran sektor informal ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan respons alami dari para pekerja informal yang mencari peluang di sekitar magnet ekonomi baru (Purwanto, 2014).

Kehadiran sekitar 127 PKL di sekitar kawasan Simpang Lima menggambarkan dinamika antara ruang yang direncanakan dan ruang yang dijalani. Di satu sisi, pemerintah kota sering kali menganggap kehadiran PKL sebagai masalah yang merusak estetika dan keteraturan kota. Namun, di sisi lain, sektor informal ini sangat penting bagi masyarakat yang sehari-hari beraktivitas di kawasan tersebut. Para pekerja dan karyawan dengan penghasilan yang terbatas sangat bergantung pada kehadiran PKL untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Tanpa sektor informal ini, mereka akan menghadapi kesulitan besar karena harga

makanan dan barang-barang di dalam pusat perbelanjaan dan toko-toko komersial cenderung lebih mahal dan lebih ditujukan untuk kalangan menengah ke atas.

Banyaknya PKL yang berjualan diatas jalur pedestrian, membuat para pejalan kaki kesusahan untuk mengakses jalur pedestrian di sekitar kawasan ini. Hal ini menyebabkan short traffic kawasan dimana para pejalan kaki memilih untuk mengakses koridor bangunan Citraland dibanding mengakses trotoar di pinggir jalan (Rukayah, 2005). Jalur-jalur pedestrian dianggap sebagai lokasi ramai yang banyak dilalui oleh para pejalan kaki menjadi alasan mengapa para PKL memilih untuk berjualan diatas trotoar (Haryanti, 2008).

Perubahan kawasan Simpang Lima menjadi Central Business District (CBD) juga membawa dampak pada lalu lintas dan transportasi. Peningkatan aktivitas manusia di kawasan ini, dengan adanya mal-mal besar dan gedung-gedung perkantoran, menyebabkan peningkatan signifikan dalam jumlah kendaraan umum dan pribadi yang memasuki area tersebut. Sayangnya, orientasi pembangunan yang belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan kantong-kantong parkir menyebabkan penumpukan kendaraan dan kemacetan lalu lintas yang parah. Ketidakseimbangan antara jumlah kantong parkir yang tersedia dan jumlah kendaraan yang membutuhkan tempat parkir menjadi masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah kota. Selain meningkatnya kebutuhan akan kantong parkir, kebutuhan pangkalan penyedia transportasi juga meningkat. Beberapa diantaranya seperti pangkalan taksi dan pangkalan becak. Sayangnya pangkalan transportasi ini hanya berpusat di satu titik saja di Jl. Ahmad Dahlan sehingga menimbulkan titik kemacetan (Rukayah, 2005). Selain taksi dan becak, angkot juga menjadi salah satu biang kemacetan di kawasan ini. Kebiasaan mereka yang tidak tertib, menjadi salah satu faktor kemacetan di kawasan ini (Aljusta, 2020).

Dalam analisis Lefebvre, conceived space yang diwakili oleh pembangunan gedung-gedung komersial dan infrastruktur baru sering kali tidak memperhitungkan lived space, yaitu ruang yang sebenarnya digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Ini menghasilkan ketegangan antara perencanaan kota dan realitas sosial-ekonomi di lapangan. Selain itu, munculnya sektor informal di sekitar kawasan komersial juga mencerminkan ketidakseimbangan ekonomi yang lebih luas dalam masyarakat. Gedung-gedung komersial dirancang untuk melayani kebutuhan kalangan menengah ke atas, sementara banyak penduduk kota yang bekerja dan beraktivitas di kawasan ini berasal dari kelas menengah ke bawah. Ketidakmampuan mereka untuk mengakses layanan dan barang-barang di dalam gedung komersial memaksa mereka untuk mencari alternatif yang lebih terjangkau di sektor informal sekitar kawasan.

Simpulan

Perebutan ruang di kawasan Simpang Lima Semarang pada periode 1975-2000 mencerminkan dinamika kompleks antara berbagai kepentingan ekonomi, sosial, dan politik. Kawasan ini, yang awalnya dirancang sebagai pusat kegiatan kebudayaan dan sosial, mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah dan dorongan dari sektor privat. Awalnya, Simpang Lima diprakarsai oleh Presiden Soekarno dengan visi untuk menjadi ruang publik multifungsi yang dapat menampung aktivitas sosial dan politik. Namun, perubahan orientasi pembangunan pada era Orde Baru mengarahkan fokus pada nilai ekonomi dan investasi, yang mengubah fungsi ruang dari sosial menjadi ekonomi.

Dalam dokumen Rencana Induk Kota Semarang tahun 1975-2000, disebutkan bahwa Simpang Lima dibangun untuk mengembangkan kegiatan kebudayaan masyarakat. Namun, pada era Orde Baru, kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi dan peningkatan iklim investasi menyebabkan ruang-ruang publik yang awalnya dirancang untuk kepentingan sosial diubah menjadi kawasan komersial. Gedung-gedung seperti gelanggang olahraga dan Wisma Pancasila digantikan oleh pusat perbelanjaan seperti Mal Ciputra dan Plasa Simpang Lima. Kontestasi ruang ini melibatkan pemerintah kota yang ingin meningkatkan pendapatan, sektor privat dengan modal besar, dan masyarakat umum yang membutuhkan ruang publik untuk kegiatan sehari-hari. Dalam kontestasi ini, sektor privat dan pemerintah sering kali lebih dominan, menguasai dan mengubah ruang kota sesuai dengan kepentingan mereka, sementara masyarakat umum, terutama kelas menengah ke bawah, menjadi pihak yang terpinggirkan.

Dampak dari perebutan ruang di kawasan Simpang Lima sangat signifikan baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Perubahan fungsi ruang publik menjadi ruang komersial membawa berbagai konsekuensi bagi masyarakat setempat. Hilangnya ruang publik yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas sosial dan

komunal berdampak pada masyarakat yang kini harus mencari tempat lain untuk berkegiatan. Kehilangan ruang-ruang ini mengakibatkan masyarakat kehilangan akses ke tempat-tempat yang sebelumnya digunakan untuk berolahraga, berkumpul, dan berinteraksi. Selain itu, transformasi kawasan ini menjadi Central Business District (CBD) menyebabkan meningkatnya aktivitas terutama dalam sektor ekonomi. Kehadiran gedung-gedung komersial memunculkan sektor-sektor informal seperti PKL untuk berdagang di kawasan ini. Para PKL yang mengambil jalur pedestrian di kawasan ini mengakibatkan hilangnya hak-hak para pejalan kaki.

Perubahan ini juga mengubah dinamika sosial dan ekonomi kawasan tersebut. Pusat-pusat komersial yang baru lebih banyak melayani kalangan menengah ke atas, sementara masyarakat kelas menengah ke bawah kesulitan mengakses fasilitas yang ada. Peningkatan aktivitas ekonomi di kawasan ini juga menyebabkan peningkatan lalu lintas dan kemacetan. Selain itu, perubahan fungsi ruang di Simpang Lima berdampak pada hilangnya identitas lokal dan nilai-nilai budaya yang sebelumnya melekat pada kawasan tersebut. Penggantian ruang-ruang sosial dan komunal dengan gedung-gedung komersial menyebabkan masyarakat kehilangan bagian dari sejarah dan identitas mereka yang terkait dengan ruang-ruang tersebut.

Dengan melihat kembali teori Production of Space oleh Henri Lefebvre, kita dapat memahami bahwa ruang kota adalah hasil dari proses sosial, ekonomi, dan politik yang dinamis. Dalam konteks Simpang Lima, kontestasi ruang mencerminkan bagaimana berbagai kepentingan berinteraksi dan bagaimana perubahan fungsi ruang membawa dampak signifikan bagi masyarakat setempat. Dengan memahami dinamika ini, perencana kota dan pembuat kebijakan dapat merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengutamakan nilai ekonomi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat.

Referensi

- Aljusta, B. W. D. (2020). Era Kejayaan Angkutan Umum Di Kota Semarang Tahun 1990-1999. *Journal of Indonesian History*, 9(2), 134-141.
- Basundoro, P. (2004). *Problem Pemukiman Pascarevolusi Kemerdekaan: Studi Tentang Pemukiman Liar di Kota Surabaya 1945-1960*. Gadjah Mada University.
- Basundoro, P. (2018). *Merebut Ruang Kota: Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900-1960an*. Marjin Kiri.
- B. Broomer, et all. (1995). *Semarang Beeld Van Een Stad, Purmerend*. Asia Maior.
- Brotosunaryo, P. M., Wahyono, H., & Sariffuddin, S. (2013). Strategi Penataan dan Pengembangan Sektor Informal Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 7(2), 71-80.
- Crang, M. (1999). Globalization as Conceived, Perceived and Lived Spaces. *Theory, Culture & Society*, 16(1), 167-177.
- Delta, A. F. (2023). Pertarungan Simbolik di Atas Trotoar Area Pasar TP (Tugu Pahlawan) Pagi Surabaya. *Biokultur*, 12(1).
- Haryanti, D. T. (2008). *Kajian Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Kawasan Bundaran Simpang Lima Semarang* (Doctoral Dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Kuntowijoyo, D. R. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang Pustaka.
- Lefebvre, H., Nicholson-Smith, D., & Harvey, D. (1991). *The Production of Space*. Oxford: Blackwell.
- Makkelo, Ilham Daeng. (2008). Sejarah Perkotaan: Sebuah Tinjauan Historiografis dan Tematis. *Jurnal Lensa Budaya*, 12(02), 83-101.
- Muljadinata, Albertus Sidharta, dan Salura, P. "Dominasi Konsep Lokal Pada Rancangan Karsten". *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, Vol 7 No. 4, 2019.
- Nugraha, M. L., & Mardiansjah, F. H. (2016). Pergeseran Kebijakan Tata Ruang Kota Semarang 1975-2011: Dari Pembangunan Sektoral Menuju Keterpaduan Ruang. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 12(4), 400-417.
- Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 1981 Tentang Rencana Induk Kota Semarang 1975-2000.

- Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1995-2005.
- Prasetyo, A. G. (2012). Menuju demokrasi rasional: Melacak pemikiran jürgen habermas tentang ruang publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 16(2), 169-185.
- Pratama, A. A., & Wasino, W. (2023). Kehidupan Gelandangan di Jakarta Tahun 1962-1977. *Journal of Indonesian History*, 11(2), 25-34.
- Purcell, M. (2014). Possible worlds: Henri Lefebvre and the right to the city. *Journal of urban affairs*, 36(1), 141-154.
- Purwanto, Edi. (2014). Privatisasi Ruang Publik dari Civic Centre menjadi Central Business District (Belajar dari kasus Kawasan Simpang Lima Semarang). *Jurnal Tataloka*, 16(3), 153-167.
- Rukayah, R. S. Alun-alun Lama dan Wilhelmina Plein: Ruang Terbuka Kota di Pusat Pemerintahan Tradisional dan Kolonial di Semarang. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol 6 No. 2, 2021.
- Salawati, A. R. (2021). Gelandangan Pada Masa Revolusi Kemerdekaan di Semarang Tahun 1945-1950. *Journal of Indonesian History*, 10(2), 179-190.
- Sasongko, P. D. (2002). *Kajian Perubahan Fungsi Taman Kota di Kota Semarang* (Doctoral Dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Setiawan, B. (2010). *Kampung kota dan kota kampung: Tantangan perencanaan kota di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Suara Merdeka. (1996). *STM Pembangunan Akan Dijual kepada Investor*.
- Suhada, D. N., & Arifianto, R. (2023). Menelisik Ruang dan Konflik Hak atas Kota dalam Problematika Terbitnya Undang-Undang Produk Hukum di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(08), 587-598.
- Supriadi, Y. (2017). Relasi ruang publik dan pers menurut Habermas. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 1(1).
- Tio, Jongkie. (2008). *Kota Semarang dalam Kenangan*. Michigan: University of Michigan.
- Tricana, D. W. (2013). Media Massa dan Ruang Publik (Public Sphere), Sebuah Ruang yang Hilang. *ARISTO*, 1(1), 8-13.
- Wijono, Radjimo Sastro. (2013). *Modernitas dalam Kampung: Pengaruh Kompleks Perumahan Sompok terhadap Pemukiman Rakyat di Semarang Abad ke-20*. Jakarta: LIPI Press.
- Yoppie, Christian. (2018). Menuju Urbanisasi Pulau Kecil: Produksi Ruang Abstrak dan Perampasan. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 2(1), 45-63.
- Zhang, Z. (2006). What is Lived Space. *ephemera*, 6(2), 219-223.

